

ABSTRAK

KONSTRUKSI HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH

Oleh

MUHAMAD YUDHO SYAFEI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan *statue approach*, *conceptual approach*, *hystorical approach*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data diolah secara sistematis. Setelah itu dianalisis secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan terjadinya kesepakatan damai antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang melahirkan nota kesepahaman yakni MoU Helsinki menimbulkan konsekuensi berupa diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 Tentng otonomi khusus daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh, Aceh memiliki kewenangan yang istimewa, yaitu otonomi khusus yang luas, sehingga memiliki konstruksi hubungan dengan pemerintah pusat seperti pengaturan bagi hasil sumber daya alam dengan pemerintah pusat yang relatif besar, dana perimbangan dan dana tambahan otonomi khusus bagi Aceh. Penyelenggaraan lembaga peradilan di Aceh, serta turut campur pemerintahan Aceh dalam urusan pertahanan dan keamanan yang pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh berimplikasi akan terjadi kecemburuan daerah lain dalam NKRI ingin melakukan tuntutan serupa bahkan menuntut merdeka.